

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN SETORAN WAJIB PAJAK
UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NO.23/2018 DI KPP
PRATAMA MALANG SELATAN**

Disusun Oleh:

Salsabila Keisha Azzahra

NIM. 155020307111003

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN SETORAN WAJIB
PAJAK UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NO.23/2018 DI KPP
PRATAMA MALANG SELATAN**

Yang disusun oleh:

Nama : Salsabila Keisha Azzahra

NIM : 155020307111003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Nopember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Jimmy Andrianus, Drs., MM., Ak.
NIP. 195504281986011001
(Dosen Pembimbing)
2. Lilik Purwanti, Dr., Dra., M.S.i., Ak.
NIP. 196407091991032007
(Dosen Penguji 1)
3. Wuryan Andayani, SE., Ak., M.S.i
NIP. 196810291999032001
(Dosen Penguji 2)

Malang, 19 Desember 2018

Ketua Program Studi S1 Akuntansi


Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.S.i., Ak.
NIP. 195909021986012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Keisha Azzahra
NIM : 155020307111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN SETORAN WAJIB PAJAK
UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NO. 23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA MALANG SELATAN**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 1 Desember 2018

Pembuat Pernyataan,



Salsabila Keisha Azzahra

NIM. 155020307111003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARTMAN No 100 MALANG KODE POS 55122
TELEPON (0341) 403333, 403461/62 FAKSIMILE (0341) 403463, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 2915 /WPJ.12/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n Salsabila Keisha Azzahra, NPM 155020307111003

12 November 2018

Yth. Kepala KPP Pratama Malang Selatan
Jl. Merdeka Utara No. 3
Malang

Sehubungan dengan surat dari Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor 9484/UN.10.F02.13/PP/2018 tanggal 17 November 2018 tentang Penelitian Skripsi, atas :

Nama / NPM : Salsabila Keisha Azzahra / 155020307111003
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul Skripsi : Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Dibertakukannya PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Selatan

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari
NIP. 196503201992031001

Kp. BD 05/BD 0501



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN SETORAN WAJIB PAJAK
UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NO.23 TAHUN 2018 DI KPP
PRATAMA MALANG SELATAN**

Yang disusun oleh:

Nama : Salsabila Keisha Azzahra

NIM : 155020307111003

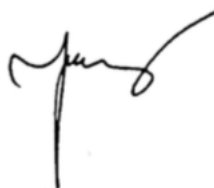
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komperehensif.

Malang, 1 Desember 2018
Dosen Pembimbing,



Drs. Jimmy Adrianus, MM., Ak.
NIP. 195504281986011001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Salsabila Keisha Azzahra
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 09 Januari 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Merapi no. 214 B Jatibening I
Alamat Email : keishabila@gmail.com
Pendidikan Formal :
SD (2004-2010) : SD N Pati Kidul 01 Pati
SMP (2010-2012) : SMP N 3 Pati
SMA (2012-2015) : SMA N 3 Semarang
Perguruan Tinggi (2015-2018) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Universitas
 Brawijaya.
Pendidikan Non Formal :
 • Program Sertifikasi Pajak BREVET A, B, dan C (2018)
Pengalaman Organisasi :
 • Staf Departemen Informasi dan Komunikasi HMJA FEB UB (2016)
 • Staf Manager EBBRAU FEB UB (2016)
 • Sekretaris Departemen Informasi dan Komunikasi HMJA FEB UB (2017)
 • Ketua Manager EBBRAU FEB UB (2017)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP NO.23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”**. Tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi tentunya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus saya berikan kepada:

1. Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Drs. Roekhudin, M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Jimmy Andrianus, MM., Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.

4. Ibu Wuryan Andayani dan Ibu Lilik Purwanti selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan terhadap kekurangan yang terdapat pada penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dwi Joko Kristanto dan Ibu Febri Saraswati, selaku kedua orang tua penulis, dan ketiga adik penulis, Muhammad Farrel Bramantyo, Safina Audria Azzahra, dan Putri Amira Azzahra yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan selalu memberikan bantuan dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III yang telah memberikan izin dan bantuan dalam memberikan data yang diperlukan oleh penulis sehingga dapat memudahkan dalam penulisan skripsi terutama (Om Rusdi dan Om Martanto).
7. Mirza Adliawan, selaku kekasih penulis yang senantiasa menemani penulis dengan sabar, dan selalu memberi dukungan penuh saat penulisan skripsi berlangsung.
8. Sri Wahyuningsih, Muhammad Nadhil Hakim, Khalifah Rizky Razabilah, Amar Irfan Rizqi, dan Hafizhan Qashidi yang selama pengerjaan skripsi telah banyak membantu, menemani, berjuang bersama, dan menjadi teman dalam menghabiskan waktu melewati suka dan duka dari awal hingga akhir masa studi.
9. Muhammad Zidni Iqomatudin dan Dinda Annisa, selaku sahabat penulis yang selalu tulus menemani dalam suka maupun duka.

10. Nabilah Nurliska, Firyal Adibah, Evan Juna, Rayhad Tanzil, Satrio Adhi selaku teman-teman kontrakan leli (Group BBK) yang telah banyak memberikan bantuan selama dua tahun terakhir.
11. Trietanti Azalea Hermanto, Ardiani Wahyu Prabawati, Afina Faza Fariha, Hanjar Dwi Ningrum, Nadya Rachmatita, Duma Hutapea, dan Kadek Anggi Bet (Group CI) selaku teman-teman yang selalu menemani penulis untuk bersenda gurau dan selalu menerima penulis apa adanya.
12. Nabila Husna, selaku sahabat senasib penulis yang selalu ada.
13. Avondio Yusuf, selaku sahabat senasib penulis yang selalu ada.
14. Annesha Paramitha dan Indah Kusuma Dewi selaku sahabat program kerja selama masa kuliah.
15. Bening Shaqila, Nada Fitria, Priskila Hasiana, Rahadian Andriansyah, selaku adik-adik penulis selama masa perkuliahan.
16. Group Jadday Express, Jessyca Asih, Aisyah Hamid, Amararenggana, Andrea Ramadani, Lulu Nandita, Nursanabila Farizi, Mazaya Faridhal, dan Risma selaku teman-teman di akuntansi yang senantiasa menemani penulis.
17. Alfiana Yurizka Diamansari, Putri Aisyah Maharani, dan Indah Riana Putri Cahyani selaku cucu dari Mbahti dan Mbahkung.
18. Mami, Ayah, Mbahti, dan Mbahkung, selaku nenek dan kakek penulis tercinta.
19. Safina Dea Chairunnisa dan Luthfiyyah Azhari, selaku sahabat penulis sejak SMA.
20. Alvarina Khairunnisa, Rani Shinta, Mutiara Annisa, Emerensia Ken Elsa, dan Dharma Nirmala selaku teman penulis selama SMA.

21. Teman-teman GGC Thunders 05, terutama Arinda Faradila, Diana Fitri, dan A Asa.
22. Teman-teman MAC Allstar, terutama Kaafi, Chiwinda, Nugi, Kak Fevi, Koko, Bayu, Mas Gilang, Kak Iwid, Mba Windha, Catur, Audy, Rafli, Kaka, Mel, Chi, Retty, Dino, Dayu, Happy, Kak Mute, Kak Citra, Aura, Mita, Ucup.
23. Kakak-kakak angkatan 2013 dan 2014 yang telah banyak memberikan bimbingan dan pembelajaran untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
24. Adik-adik angkatan 2016 dan 2017 yang telah banyak berbagi cerita dan kenangan indah bersama ketika berada di Kampus maupun di luar Kampus.
25. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah banyak berjuang bersama dalam mengabdikan kepada almamater serta menjadi wadah dalam aktualisasi diri.
26. Pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, namun telah banyak memberikan dukungan terhadap proses penyelesaian skripsi penulis.

Penulis merasa masih perlu untuk membenahi diri dengan berharap akan kritik dan saran yang membangun untuk langkah perbaikan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca.

Malang, 1 Desember 2018

Salsabila Keisha Azzahra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
SURAT IZIN RISET	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	18



2.2.1	Perpajakan	18
1.	Definisi Pajak	18
2.	Fungsi Pajak	20
3.	Syarat Pemungutan Pajak	21
2.2.2	UMKM	22
2.2.3	Kepatuhan Wajib Pajak	25
1.	Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.	Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	26
3.	Faktor dan Manfaat Kepatuhan Perpajakan	28
4.	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	29
5.	Wajib Pajak Badan	30
2.2.4	Surat Setoran Pajak	31
2.2.5	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	32
2.2.6	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	33
2.3	Kerangka Berpikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Objek, Waktu, dan Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2.1	Objek dan Waktu Penelitian	38
3.2.2	Ruang Lingkup Penelitian	38
3.3	Sumber Data	39
3.3.1	Data Primer	39
3.3.2	Data Sekunder	40
3.4	Metode dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Informan Penelitian	42
3.6	Teknik Analisis Data	43
3.7	Keabsahan Data	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Perusahaan	46
4.1.1	Sejarah Umum Perusahaan	46
4.1.2	Lokasi Perusahaan	47
4.1.3	Struktur Organisasi	48
4.2	Visi, Misi, dan Tujuan	49
4.2.1	Visi KPP Pratama Malang Selatan	49
4.2.2	Misi KPP Pratama Malang Selatan	49
4.3	Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM	49
4.3.1	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	50
4.3.2	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	52
4.3.3	Analisis Tingkat Setoran Wajib pajak Orang Pribadi	53
4.3.4	Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Badan	54
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	60

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN.....	65
----------------------	----

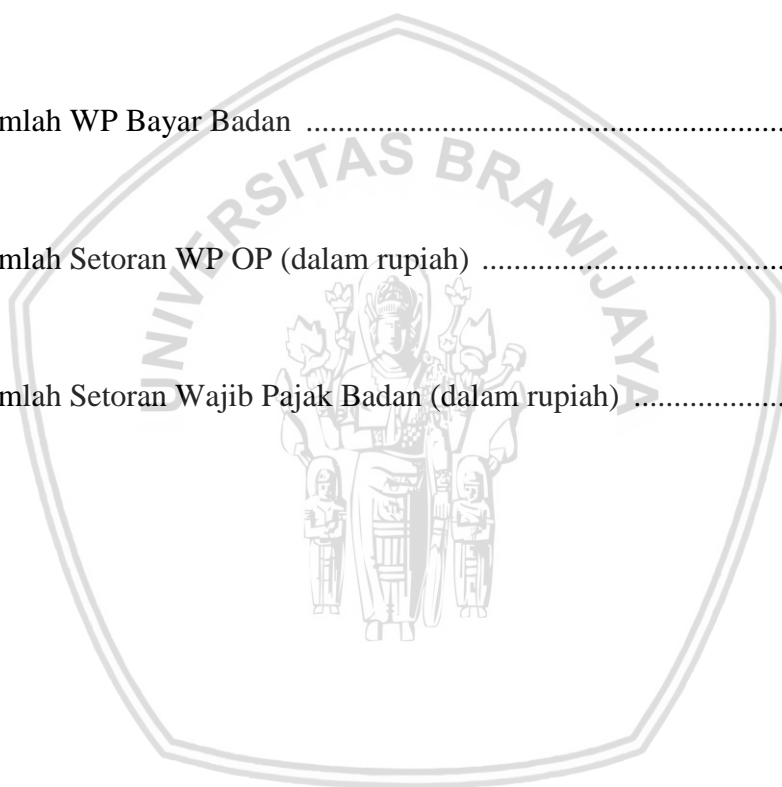


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2017	4
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 3.1	Bagan Model Interaktif Analisis Data	43
Gambar 4.1	Lokasi KPP Pratama Malang	47
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang	48
Gambar 4.3	Jumlah WP Bayar OP	51
Gambar 4.4	Jumlah WP Bayar Badan	53
Gambar 4.5	Jumlah Setoran WP OP	54
Gambar 4.6	Jumlah Setoran WP Badan	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1	Tabulasi Informan	39
Tabel 4.1	Jumlah WP Bayar OP	50
Tabel 4.2	Jumlah WP Bayar Badan	52
Tabel 4.3	Jumlah Setoran WP OP (dalam rupiah)	54
Tabel 4.4	Jumlah Setoran Wajib Pajak Badan (dalam rupiah)	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Trankskip Wawancara dengan Informan 165
2. Trankskip Wawancara dengan Informan 267



repository.ub.ac.id

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN SETORAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA DIBERLAKUKANNYA PP NO. 23/2018 DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN

Oleh:

Salsabila Keisha Azzahra

Dosen Pembimbing:

Drs. Jimmy Andrianus, MM., Ak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tingkat kepatuhan dan setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan *case study* yang merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi kepada dua informan yaitu *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data dan Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan, yang mengetahui seluk beluk dan paham betul mengenai perpajakan. Alat analisis yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data serta menarik hasil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan WP UMKM baik OP dan Badan meningkat. Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara formal, yaitu sesuai dengan target (adanya kenaikan pada jumlah wajib pajak). Tingkat setoran WP UMKM baik Orang Pribadi dan Badan menurun. Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara material, walaupun jumlah setoran menurun, akan tetapi wajib pajak yang dahulunya belum patuh menjadi patuh, dan diharapkan setoran akan bisa meningkat kedepannya.

Kata Kunci : tingkat kepatuhan, tingkat setoran, PP No.23 Tahun 2018

**AN ANALYSIS OF ON THE COMPLIANCE LEVEL AND TAX PAYMENT
OF MSME TAXPAYERS AFTER THE ENACTMENT OF THE
GOVERNMENT REGULATION NO. 23/2018 IN SMALL TAXPAYERS
OFFICE OF SOUTHERN MALANG**

By:

Salsabila Keisha Azzahra

Supervisor:

Drs. Jimmy Andrianus, MM., Ak.

ABSTRACT

This research aims to identify and to analyze the compliance level and the tax payment on the lower rates of MSME taxpayers in Small Taxpayers Office of Southern Malang after the enactment of the government regulation No. 23 in 2018. The method being used in this research to analyze the data is qualitative comparative analysis method with case-study approach applied within this research which is to investigate an issue with detailed limitation, to gather the data in an in-depth way, and also to provide several information sources. The data are obtained through interview and documentation upon two respondents which are Account Representative of Surveillance and Consultation IV Section in Small Taxpayers Office of Southern Malang as the informant dan The Head of Small Taxpayers Office of Southern Malang who understands the ins and outs about taxation. The tools being used to analyze the data are data reduction, providing the data, and to give a conclusion. The results of this research shows that after the enactment of the government regulation No. 23 in 2018, the compliance level of MSME taxpayers, both Individual Taxpayer and Agencies have arisen. These include the compliance of taxpayers formally, which is in accordance with the target (the growth of the number of taxpayers). The level of the MSME taxpayers as for Individual and Agencies have fallen. These include the material compliance of taxpayers, eventhough the numbers of tax payment has fallen, however, the previous taxpayers who were not obedient has become obedient, and hopefully the number of tax payment will also increasing as well in the future.

Key Terms : compliance level, tax payment level, government regulation No. 23 in 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat nomor empat terbanyak di dunia. Urutan negara dengan penduduk terbanyak adalah China, diikuti India, dan kemudian United States (CIA World Factbook, 2018). Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265,015,300 jiwa atau sekitar 3,5% dari total jumlah penduduk di dunia. Jumlah penduduk yang termasuk banyak tersebut dapat memicu pergerakan perekonomian yang memiliki potensi besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Sukirno (dalam Purnama, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh masyarakat bertambah.

Sukirno juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenar- benarnya barang dan jasa yang di produksi dalam perekonomian. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara perlu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto Riil, dalam menghitung pendapatan nasional dan komponennya menurut harga tetap yaitu harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih (dalam Wardhana, Budhi, dan Yasa, 2018). Masyarakat di Indonesia sebagian besar melakukan usaha

industri yang dikategorikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (Prabantari, 2017).

Usaha industri merupakan salah satu cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya UMKM (Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terus berkembang secara konsisten di Indonesia menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, karena UMKM sudah lama terus berkembang seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah baik dari sisi informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan dan karena adanya kemudahan tersebut, UMKM telah mendominasi perekonomian Indonesia (Prabantari, 2017). Menurut Urlita (2017), hal ini dapat dibuktikan dari terjadinya defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat di tahun 2008 pada saat krisis global, karena banyak negara maju mendapatkan imbas yang sangat signifikan, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Namun lain halnya dengan Indonesia. Indonesia tidak mendapatkan imbas yang sangat signifikan karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi krisis tahun 1998 dan sektor UMKM mampu menjadi salah satu benteng perekonomian rakyat sehingga kondisi ekonomi Indonesia tidak semakin terpuruk.

Sari (dikutip oleh Fitriati, 2014) menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005 hingga tahun 2025. RJPN ini berisi tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memfasilitasi UMKM dan serta bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri kreatif dengan pemberdayaan UMKM. Hal

pertama yang perlu dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM adalah perlunya kebijakan perbaikan lingkungan usaha. Kedua, pemberdayaan harus berfokus pada peningkatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif untuk kepentingan perluasan usaha. Dan ketiga, pemberdayaan UMKM harus memahami karakteristik dan perilaku pelaku usaha itu sendiri.

Meskipun skala usaha, omset, dan laba dari UMKM tergolong lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, UMKM yang jumlahnya sangat banyak dapat berkontribusi besar bagi perekonomian dan patut dipertimbangkan. Meskipun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan, nyatanya UMKM mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi, dan hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah mulai melirik peranan UMKM dalam perekonomian nasional (Mahendra dan Pradoto, 2016).

Sebagai kota terpadat dan terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, kota Malang mengembangkan UMKM yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dalam wujud pengembangan UMKM dalam rangka untuk mengembangkan UMKM (Mahendra dan Pradoto, 2016).

Berikut merupakan paparan jumlah UMKM yang berada di Kota Malang (tahun 2012 – 2017) :

Tabel 1.1

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2012 - 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015 ⁽¹⁾		TAHUN 2016 ⁽²⁾		TAHUN 2017 ⁽³⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2017	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.211.396		56.539.560		57.900.787		59.267.759		61.656.547		62.928.077		7.716.680	13,98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	59.262.772	99,99	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99	7.716.172	13,98
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	58.521.987	98,74	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70	7.546.931	13,83
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	654.222	1,13	681.522	1,15	731.047	1,19	757.090	1,20	154.895	25,72
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	52.106	0,09	59.263	0,10	56.551	0,09	58.627	0,09	14.347	32,40
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	5.066	0,01	4.987	0,01	5.370	0,01	5.460	0,01	508	10,26
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104.613.681		110.808.154		117.681.244		127.423.437		116.273.356		120.260.185		15.646.504	14,96
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	123.229.386	96,71	112.828.610	97,04	116.673.416	97,02	14.950.958	14,70
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	110.807.864	86,96	103.839.015	89,31	107.232.992	89,17	12.275.195	12,93
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	7.307.503	5,73	5.402.073	4,65	5.704.321	4,74	1.784.329	45,52
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	5.114.020	4,01	3.587.522	3,09	3.736.103	3,11	891.434	31,34
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	4.194.051	3,29	3.444.746	2,96	3.586.769	2,98	695.545	24,06
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	7.445.344,6		8.241.864,3		9.014.951,2		10.141.340,0		11.712.450,6		12.840.859,0		5.395.514,4	72,47
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.321.830,0	58,05	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	6.228.285,0	61,41	7.009.283,0	59,84	7.704.635,9	60,00	3.382.805,9	78,27
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.579.388,4	34,64	2.951.120,6	35,81	3.326.564,8	36,90	3.841.836,0	37,88	4.292.287,8	36,65	4.727.989,4	36,82	2.148.601,0	83,30
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	740.271,3	9,94	798.122,2	9,68	876.385,3	9,72	984.489,0	9,71	1.128.056,8	9,63	1.234.210,7	9,61	493.939,4	66,72
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.002.170,3	13,46	1.120.325,3	13,59	1.237.057,8	13,72	1.401.960,0	13,82	1.588.938,3	13,57	1.742.435,7	13,57	740.265,5	73,87
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.123.514,6	41,95	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	3.913.055,0	38,59	4.703.167,6	40,16	5.136.223,1	40,00	2.012.708,5	64,44
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.377.110,0		2.525.120,4		2.670.314,8		2.866.438,0		9.045.739,5		9.504.148,6		7.127.038,6	299,82
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.369.326,0	57,60	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	1.655.430,0	57,75	5.171.063,6	57,17	5.425.414,7	57,08	4.056.088,7	296,21
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	761.228,8	32,02	790.825,6	31,32	807.804,5	30,25	848.985,0	29,62	2.736.613,7	30,25	2.856.607,8	30,06	2.095.379,0	275,26
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	261.315,8	10,99	294.260,7	11,65	342.579,2	12,83	395.426,0	13,80	1.123.131,8	12,42	1.191.871,1	12,54	930.555,3	356,10
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	346.781,4	14,59	366.373,9	14,51	386.535,1	14,48	411.019,0	14,34	1.311.318,0	14,50	1.376.935,8	14,49	1.030.154,4	297,06
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.007.784,0	42,40	1.073.660,1	42,52	1.133.396,0	42,44	1.211.008,0	42,25	3.874.675,9	42,83	4.078.734,0	42,92	3.070.950,0	304,72

Berdasarkan paparan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan pada jumlah UMKM yang berada di Malang, yaitu sejumlah 7.716.172 unit atau mengalami kenaikan pangsa pasar sebesar 13,98% dari tahun 2012 hingga tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018). Perkembangan UMKM yang terus menerus bertambah ini juga berpengaruh terhadap perekonomian negara, salah satu indikator penentunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Bersumber pada tabel 1.1, PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan sama-sama memiliki kenaikan. Pada PDB atas dasar harga berlaku sebesar 3.382.805,9 miliar rupiah atau kenaikan pangsa pasar sebesar 78,27 %, dan untuk PDB atas dasar harga konstan sebesar 4.056.088,7 miliar rupiah atau kenaikan pangsa pasar sebesar 296,21 % (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dengan adanya pertumbuhan UMKM khususnya di Kota Malang dapat membantu mensejahterakan serta memajukan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang sebanding antara pajak dan UMKM.

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peranan yang sangat penting, salah satunya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup bergantung

pada pajak, dan oleh karena itulah pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. (Keziana, 2016).

Menurut Burton dan Ilyas, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan negara (Hakim dan Nangoi, 2015).

Sedangkan menurut Franata, Sirajuddin, dan Keristin (2014) pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa/ timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang ditunjukkan kepada rakyat, pajak yang di pungut pemerintah digunakan untuk membayar pengeluaran umum (seperti: pembangunan jalan raya, pembangunan akses-akses pemerintah, dll).

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Wajib pajak yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam UU No.28 Tahun 2007 adalah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi wajib pajak dalam menurut Muqodim dalam Simanjuntak (2012) adalah wajib pajak merupakan setiap individu atau seseorang berdasarkan ketentuan di dalam peraturan perpajakan yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meliputi pemungut pajak atau penanggung pajak dalam pajak tertentu.

Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan. Rahmat Saleh (2004) menyatakan bahwa teori kepatuhan telah secara signifikan diteliti melalui kajian ilmu sosial khususnya bidang psikologis dan sosiologi, dimana kedua ilmu tersebut lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu.

Menurut Mahendra (2014) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010), mengemukakan “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yang merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Patuh atau tidaknya wajib pajak dapat dinilai dari tingkat kepatuhan yang bersandarkan kepada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Dharma dan Ariyanto, 2014).

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak berdampak besar karena apabila wajib pajak tidak patuh, otomatis mereka tidak akan membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang sudah dimiliki (Burhan, 2015).

Menurut KBBI, setor adalah membayar, memasukkan, atau menyerahkan. Sedangkan setoran adalah hasil dari menyetorkan atau apa-apa yang disetorkan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP inilah yang merupakan media yang dapat

digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam pembayaran pajak yang terutang (Dewi, 2007).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak sebesar 1%. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Langkah dan upaya yang diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat setoran pajak menurun walaupun jumlah wajib pajak bias dikatakan naik. Hal tersebut didasari pada artikel yang dilansir oleh Surya Malang (2018) mengemukakan bahwa Kepatuhan membayar pajak di Kota Malang ternyata masih rendah.

Pada penelitian ini, wajib pajak UMKM yang dianalisis oleh peneliti yakni yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.

23 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)), dan dengan adanya penurunan tarif pajak, apakah penurunan ini berpengaruh atau tidak terhadap jumlah wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak, seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23. Peneliti mengambil sebuah pembahasan terkait dengan wajib pajak dan setoran pajak pada PP Nomor 23 Tahun 2018 karena masih tergolong baru dan belum ada yang meneliti terkait dengan peraturan tersebut serta penelitian terdahulu yang telah digunakan sebagai rujukan hanya menganalisis PP Nomor 46 tahun 2013, dan hal ini merupakan keunikan dari penelitian sebelumnya. PP Nomor 23 Tahun 2018 baru saja ditetapkan pada 1 Juli 2018, dan peneliti bangga karena masih sedikit penelitian yang membahas hal ini.

Maka dari itu, sesuai dengan berbagai informasi yang ditarik dari latar belakang yang sudah tertera di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?

2. Bagaimana tingkat setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab sebuah rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018. Tujuan utama tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
2. Mengetahui tingkat setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi akademis maupun praktis terkait dengan tingkat kepatuhan dan setoran terhadap penurunan tarif UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Malang Selatan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

1.4.1 Manfaat Teori

1. Sebagai bahan pembelajaran akademisi, dikarenakan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2008 masih terbilang sangat baru, masih jarang sekali yang mengangkat permasalahan ini.
2. Bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2008, apakah berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM atau tidak.
2. Bagi KPP Pratama Malang Selatan, agar dapat dijadikan pembandingan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2008.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang judul penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak, rumusan masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari variabel-variabel penelitian tentang kesadaran membayar pajak, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

Bab ini berisi telaah pustaka perihal teori-teori yang telah ada, serta riset terdahulu / penelitian terdahulu. Serta, pada bab ini, merupakan pembahasan yang lebih dalam dari bab sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian beserta analisis dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari ini yang memuat kesimpulan hasil paparan mengenai tujuan yang ingin dicapai, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan kemudian saran-saran yang harus dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap wajib pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 akan tetapi PP No. 23 Tahun 2018 masih tergolong baru dan belum ada yang menganalisis tingkat kepatuhan yang berlandaskan pada PP No. 23 Tahun 2018. Pada umumnya, kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademisi dan telah mempublikasikan pada beberapa jurnal *online*. Penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Keziana (2016)	<i>Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final</i>	Deskriptif kualitatif yang menggunakan model interaktif sebagai alat analisis	a. Analisis penerapan PP No.46 tahun 2013 cukup berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. b. Analisis penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh dalam hal menambah penerimaan PPh

Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<i>(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)</i>		final. c. Terdapat kontribusi yang bersifat fluktuatif sejak diterapkannya PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan PPh final sejak tahun 2013 – 2015. d. Analisis penerapan PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak.
2	M. Syamsul Huda dan Agus Setiawan (2014)	<i>Analisis Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada UD. Songkok Mitra Gresik</i>	Deskriptif kualitatif yang menggunakan sumber primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pada PP No. 46 tahun 2013, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto satu tahun dengan tarif 1% bersifat final, sedangkan pada PP No. 36 tahun 2008 menggunakan perhitungan norma penghasilan netto (penghasilan netto satu tahun yang dikenakan tarif PPh terutang).
3	Dien Anindia Kartiko (2016)	<i>Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013</i>	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder.	a. Dari aspek material, PER Nomor 17 Tahun 2013 lebih unggul dalam DPP yang lebih rendah, dan terdapat faktor pengurang berupa PTKP dan zakat. b. Dari aspek formal dan administratif, secara garis besar baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan perencanaan pajak yang

Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				sama (seimbang) c. Dari penghindaran sanksi pajak, secara garis besar baik PER Nomor 17 Tahun 2015 maupun PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan perencanaan pajak yang sama (seimbang) karena sanksi pajak yang digunakan sama-sama mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2009.

Sumber : Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel 2.1 terkait dengan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini ingin menelisik perbedaan yang mendasar terhadap penelitian yang serupa. Berikut akan dijelaskan mengenai hasil dan perbedaan penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Keziana (2016) yang meneliti tentang pengaruh analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan judul “Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu adalah analisis tingkat kepatuhan dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai landasan dari analisis tersebut. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 sebagai landasannya karena dirasa hal ini baru

diimplementasikan sehingga penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Setiawan (2014) meneliti tentang analisis pajak penghasilan dengan judul *“Analisis Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada UD. Songkok Mitra Gresik*. Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu adalah analisis pajak penghasilan dengan pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto satu tahun dengan tarif 1% bersifat final berdasarkan pada PP No. 46 Tahun 2013 sebagai landasan dari analisis tersebut. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto satu tahun dengan tarif 0,5% berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 sebagai landasannya karena dirasa hal ini baru diimplementasikan sehingga penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Kartiko (2016) yang meneliti tentang analisis terhadap penerapan pajak dan titik impas yang berjudul *“Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013”*. Perbedaan yang mendasar pada peneliti terdahulu adalah analisis pajak penghasilan dengan pengenaan pajak yang digunakan untuk Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM bersifat final

berdasarkan pada PER Nomor 17 Tahun 2013 dan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai landasan dari analisis tersebut. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto satu tahun dengan tarif 0,5% berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018 sebagai landasannya karena dirasa hal ini baru diimplementasikan sehingga penelitian ini ingin meneliti lebih jelas untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Perpajakan adalah suatu disiplin ilmu yang dirasa sangat dinamis yang dapat berubah setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu sesuai dengan ketentuan sebuah amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu transaksi yang baik dan unik untuk mencapai tujuan sosial yang diperbaharui sesuai dengan kondisi pada saat itu dan sebuah kebutuhan ekonomi yang terus-menerus berkembang serta merefleksikan perubahan-perubahan dalam politik.

1. Definisi Pajak

Adapun konsep dari ilmu perpajakan adalah pajak itu sendiri. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pajak. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Waluyo (2011:2), definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Menurut Agoes (2014:6), definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Penjelasan di atas merupakan beberapa definisi pajak yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) dalam pasal 1 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pada definisi yang telah dipaparkan baik teori yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang, disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah bentuk dari prestasi rakyat berupa iuran yang ditujukan kepada kas negara dan merupakan sebuah kontribusi wajib rakyat akan iuran pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional serta demi timbal balik terhadap suatu kesejahteraan bagi rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi-fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pajak tersebut. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) adalah sebagai berikut:

- a. “Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Adapun fungsi pajak menurut Sumarsan (2015:5) adalah sebagai berikut:

- a. “Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak memiliki berfungsi untuk membiayai segala bentuk pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan rutinitas dalam tugas negara dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pemerintah dapat mengatur suatu pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan dari pajak. Dengan fungsi mengatur serta memaksa, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara khususnya terhadap pembangunan.
- c. Fungsi stabilitas
Adanya sebuah fungsi dari pajak sebagai *stabilisator*, pemerintah dapat memiliki suatu dana yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga implikasinya adalah inflasi dapat dikendalikan, Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif serta efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dialihkan untuk digunakan dalam membiayai semua kepentingan umum yang termasuk untuk mendanai pembangunan-pembangunan sehingga berdampak terhadap terbukanya sebuah kesempatan kerja, yang

pada akhirnya tibal baliknya adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Berdasarkan pada pemaparan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai sebuah iuran masyarakat yang fungsinya sebagai sumber dana bagi *regulator* atau pemerintah yang dapat menstabilisasi pemasukan serta pengeluaran pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan serta dapat membiayai semua kepentingan umum yang termasuk untuk mendanai pembangunan-pembangunan guna untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang mana, dalam hal ini akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat terhadap fungsi pajak itu sendiri.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak sebagai sebuah iuran memiliki syarat yang telah ditentukan berupa prosedur sebuah pemungutan pajak sehingga dapat mengetahui apa saja ketentuan yang harus diketahui dan tidak terjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Dalam hal ini, Mardiasmo (2016:4) memaparkan bahwa syarat pemungutan pajak yaitu:

- a. “Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 - d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 - e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

Berdasarkan pada penjelasan ahli di atas, syarat pemungutann pajak didasarkan pada lima prosedur yang sesuai dengan ketentuan pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak memiliki tujuan agar pihak pemerintah dapat menjalankan sebuah mekanisme dari pemungutan pajak sehingga dapat sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.2.2 UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan istilah UMKM telah berhasil memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Pergerakan UMKM amat vital untuk menciptakan suatu pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, serta cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam ekspor dan perdagangan.

Menurut Tambunan (2017:3), dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang dari para ahli, Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pada penjelasan ahli serta didukung dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha yang proukif milik perorangan atau badan usaha dan dapat memenuhi kriteria sebuah usaha mikro kecil menengah yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Sebuah bentuk kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Dalam sebuah bentuk kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum perpajakan dimana hukum perpajakan menyebutkan bahwa tidak adanya pandang bulu dan tidak pula luput dari pengecualian baik dimana saja dan siapa saja berdasarkan ketentuan hukum khususnya pada hukum perpajakan yang berlaku yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk menghindari sebuah sanksi administrasi yang akan merugikan bagi masing-masing individu terhadap wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki sebuah definisi baik dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum perpajakan. Adapun istilah dari kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:138) adalah sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.”

Kepatuhan wajib pajak menurut Machfud dalam Rahayu (2013:139)

adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000

menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Berdasarkan pada penjelasan para ahli dan didukung oleh peraturan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dalam memenuhi suatu kewajiban dalam sebuah pembayaran iuran pajak secara akurat dalam ketepatan waktu pemenuhan sebuah kewajiban suatu wajib pajak.

2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki sebuah jenis atau kriteria yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu kepatuhan secara formal dan material. Dua komponen dalam kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut (Rahayu, 2013 : 138):

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang

- penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Adapun kepatuhan wajib pajak menurut Suandy (2014:119) bahwa kepatuhan wajib pajak secara formal yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang

- pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.”

Berdasarkan pada pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak memiliki dua jenis yaitu kepatuhan secara formal dan material sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan serta adanya sebuah penentuan terhadap waktu dalam kedua jenis kepatuhan wajib pajak tersebut.

3. Faktor dan Manfaat Kepatuhan Perpajakan

Setiap individu yang mematuhi sebuah aturan, pasti mendapatkan sebuah manfaat yang didapatkan dari sebuah kepatuhan tersebut, terlebih khususnya pada kepatuhan wajib pajak. Manfaat tersebut didapatkan pada beberapa faktor utama khususnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013 : 140) adalah:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
- b. Pelayanan pada Wajib Pajak
- c. Penegakan hukum perpajakan

- d. Pemeriksaan pajak
- e. Tarif pajak.

Sementara untuk manfaat dari kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

- a. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib pajak orang pribadi sendiri memiliki kategori menjadi dua yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income*. Perbedaan yang membuat WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan WP OPPT berbeda adalah WPOP yang menjalankan usaha merupakan WP pengusaha maupun pegawai yang memiliki penghasilan lain dari kegiatan usaha di luar pendapatan gaji, sedangkan WP OPPT merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang memiliki tempat usaha berbeda dengan domisili lebih dari satu.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7

tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS
- b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian
- f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan
- g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24
- h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter

5. Wajib Pajak Badan

Pengertian wajib pajak badan menurut Nugroho (2012) yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 adalah berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Wajib pajak badan dapat memperoleh fasilitas pajak yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 huruf c yaitu berdasarkan pada :

- a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
- b. Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya.

2.2.4 Surat Setoran Pajak

Sebelum mengetahui surat setoran pajak, terlebih dahulu harus mengetahui arti setoran secara bahasa dan istilah. Arti kata setoran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) jika dalam bahasa berarti setor, membayar, memasukkan serta menyerahkan. Adapun secara istilah, setoran adalah Suatu bentuk penyerahan baik berupa materi karena adanya kesepakatan dari awal baik menggunakan lisan maupun tulisan.

Tulisan yang dimaksud dalam setoran khususnya setoran pajak yaitu berupa surat penyetoran pajak. Pengertian surat penyetoran pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Resmi (2012:34) menyatakan bahwa:

“Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian surat SSP menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa surat setoran pajak adalah sebuah alat bukti pembayaran atas sebuah penyetoran pajak yang berupa formulir.

2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dapat menimbang:

1. Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Berdasarkan pada besarnya tarif pajak, maka telah tercantum dalam pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 bahwa:

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan poin yang dapat diterima, dapat disimpulkan bahwa besarnya Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

2.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto menimbang bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan sebuah peraturan yang telah diperbaharui dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu:

“Bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”

Hal yang menunjang dalam suatu perubahan terhadap peraturan tersebut dapat ditinjau dari pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu:

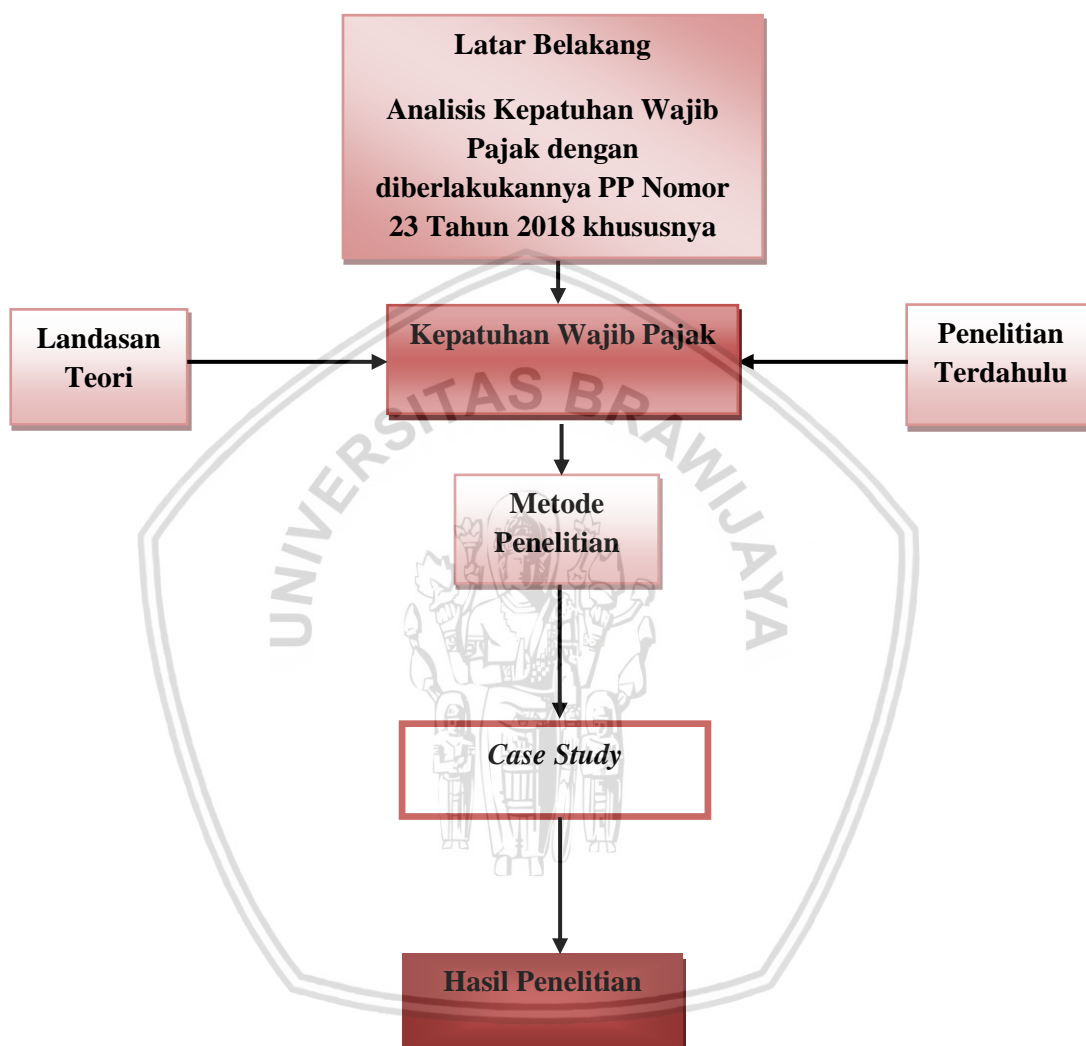
“Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan”

Berdasarkan pada penjelasan besarnya pajak penghasilan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan dapat meringankan para pelaku bisnis dan mereka akan senantiasa melakukan pembayaran pajak jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menggunakan standar tarif sebesar 1%.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2010), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan

teori dan penelitian disusun suatu kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Data Primer diolah, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2017 : 2) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Semiawan (2010 : 5) mendefinisikan metode penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan ‘bertahap’ karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Metode penelitian merupakan tuntutan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa dan bagaimana prosedurnya (Widi, 2010 : 68). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Timotius (2017 : 2) mendefinisikan penelitian merupakan upaya manusia untuk menemukan pengetahuan baru, menciptakan pengetahuan atau produk baru, dan/atau memecahkan atau mencari solusi dari suatu permasalahan ilmiah atau sehari-hari. Upaya penelitian tersebut perlu dilakukan secara logis/rasional dan sistematis sehingga informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat dapat diperoleh.

Sukoharsono (2006) menyebutkan bahwa penelitian dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang bersifat numerik serta analisisnya menggunakan statistik, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat narasi atau teks dan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau observasi dalam proses analisis data.

Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian komparatif atau penelitian *ex post facto* menurut Luthfiah dan Fitrah (2017 : 36) merupakan penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi variabel tersebut telah terjadi. Sedangkan menurut Suliyanto (2014 : 16) penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan sampel/populasi satu dengan sampel/populasi lainnya, baik sampel yang berpasangan atau tak berpasangan (bebas). Dapat diartikan bahwa penelitian komparatif membandingkan sampel/populasi satu dengan sampel/populasi lainnya, dengan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung.

Menurut Sekaran (2006), studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkni berdasarkan pengalaman

pemecahan masalah yang ada di masa lalu. Selain itu, kasus yang diteliti terikat oleh waktu dan aktivitas, dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Creswell, 2009).

Pendekatan studi kasus (*Case Study*) merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi (Rahmat, 2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Sehingga, dalam penelitian ini, penulis membandingkan data yang dilengkapi dengan sumber informasi.

3.2 Objek, Waktu, dan Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2018, dan objek yang dituju merupakan Wajib Pajak UMKM (sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018), yaitu dengan omzet dibawah 4,8 miliar.

3.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang peneliti maksud adalah 3 kecamatan yang berada di kota Malang yang mencakup kecamatan pada KPP Pratama Malang Selatan (Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang). Akan tetapi, menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan yang telah dipaparkan yaitu karena seluruh kegiatan UMKM

paling banyak jumlahnya di KPP Pratama Malang Selatan dan terpusat pada 3 kecamatan tersebut, sesungguhnya sudah dapat merepresentasikan Kota Malang.

3.3 Sumber Data

Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi yang mewakili observasi atau pengukuran aktivitas bisnis yang penting bagi pengguna sistem informasi (Romney, 2009). Menurut Williams & Sawyer (2007), data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan di proses menjadi informasi. Berdasarkan jenis sumber data yang diperoleh, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder (Cooper & Schindler, 2011).

3.3.1 Data Primer

Lofland dalam Moleong (2010: 157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Data primer merupakan data mentah tanpa interpretasi atau pernyataan yang mewakili suatu opini atau posisi resmi, dalam hal ini data primer dapat berupa memo, surat, hasil wawancara atau pidato baik dalam format audio, video, maupun transkrip tertulis. Adapun sumber data primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan subyek penelitian, yakni pegawai KPP Pratama Malang Selatan sebagai informan utama yang mengetahui fenomena yang terjadi dan sebagai pegawai yang mengolah data. Dari data primer ini, data yang diperoleh diantaranya adalah terkait dengan

bagaimana kondisi tingkat setoran dan tingkat kepatuhan sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:137), definisi dari sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang berasal dari ensiklopedia, literatur buku, artikel, surat kabar, siaran warta berita, hingga web dan media sosial perusahaan. Adapun menurut Arikunto (2013:22) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, film rekaman video, benda-benda lain yang memperkaya data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa gambar, buku seperti dari *literature* yang berkaitan dengan fokus penelitian, surat-surat penting berupa data arsip yang dimiliki oleh sumber data primer, dan dengan mengkaji karya tulis lainnya yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari data KPP Pratama Malang Selatan dalam bentuk *soft file* pada Microsoft Excel.

3.4 Metode dan Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2017:224), teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Semakin baik proses pengumpulan data, maka hasil penelitian yang didapatkan akan semakin relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yang mana merupakan suatu proses interaksi atau kejadian antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancara atau sumber informasi (*interviewee*) secara tatap muka (*face to face*) (Yusuf, 2014 : 372).

Pada penelitian ini digunakan penelitian dengan jenis terencana-tidak terstruktur, yakni apabila peneliti telah menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2014 : 377). Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang informan dari KPP Pratama Malang Selatan.

Terdapat beberapa poin-poin dalam sebuah pedoman yang peneliti tanyakan dalam wawancara adalah:

- a. Nama dan jabatan informan
- b. Kondisi tingkat kepatuhan dan setoran saat PP No. 46 Tahun 2013 berlaku
- c. Kondisi tingkat kepatuhan dan setoran saat PP No. 23 Tahun 2018 berlaku
- d. Cakupan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pegumpulan data untuk mencari data – data mengenai permasalahan yang diteliti melalui berbagai laporan yang ada di organisasi, data gambar atau foto dan lain sebagainya. Menurut Arikunto

(2010), dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Pada teknik dokumentasi ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis yang mendukung penelitian ini. Data tertulis dari KPP Pratama Malang Selatan merupakan representasi Wajib Pajak UMKM (dalam bentuk *soft file* dalam Microsoft Excel).

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang, dimana dua orang tersebut merupakan *key informan*. Semua informan dalam penelitian ini adalah pria dewasa yang memiliki kedudukan penting di masing-masing perusahaan. Informan pertama adalah sebagai berikut :

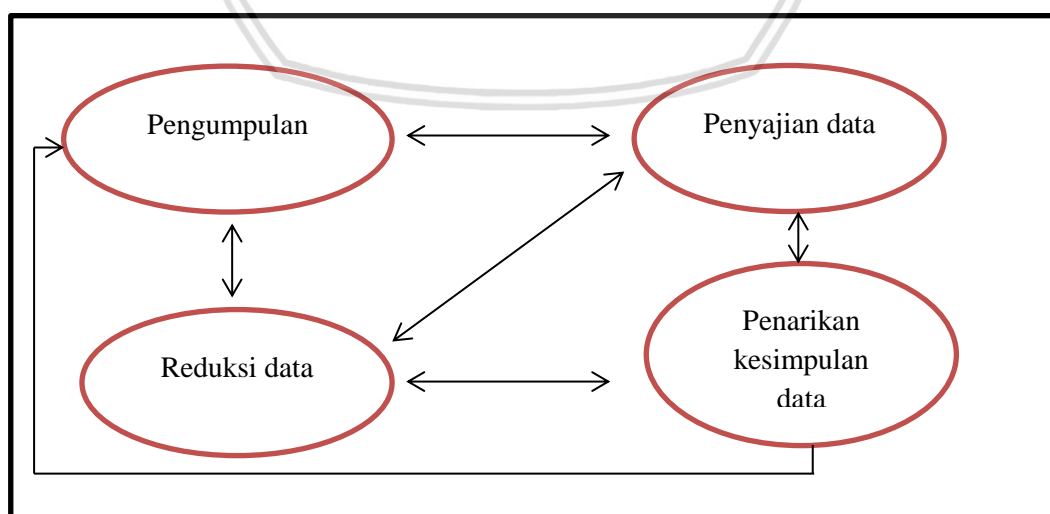
Tabel 3.1
Tabulasi Informan

No.	Nama	Jabatan	Deskripsi Tugas
1	Hasan Mustafa	<i>Account Representative</i>	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data
2	Rusdiyanto	Kepala Kantor KKP Pratama Malang Selatan	Mengetahui seluk beluk dan paham betul mengenai perpajakan.

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Hasan Mustafa, sebagai *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data, dan Rusdiyanto sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan, yang mengetahui seluk beluk dan paham betul mengenai perpajakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono (2017:244), teknik analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 3.1 Bagan Model Interaktif Analisis Data

(Sumber: Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2017:246)

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif sehingga memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara, dan diskusi dengan peneliti lainnya untuk mengembangkan wawasan dan teori yang signifikan (Sugiyono 2016:338).

Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan tentang yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1)), dan dengan adanya penurunan tarif pajak serta menganalisis tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak.

2. Penyajian Data

Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:341). Setelah memperoleh data-data kemudian data tersebut diorganisasikan. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang komplek dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan guna keperluan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2016:345). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Keabsahan Data

Menurut Zulfadrial (2012:89), keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar kebenaran data dapat dipertanggung-jawabkan, dipercaya, dan dapat dipastikan. Penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:269). Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan dan perpanjangan pengamatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Umum Perusahaan

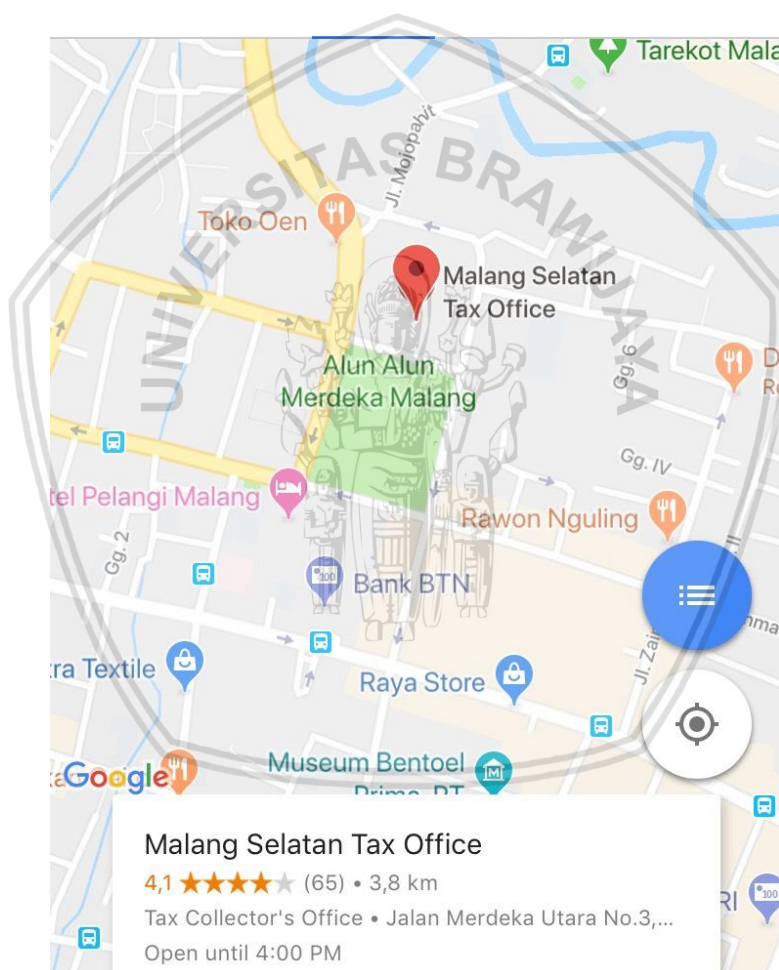
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan adalah satu dari 15 kantor pelayanan pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Pada awalnya kantor ini dikenal dengan “Kantor Pelayanan Pajak Malang” yang memiliki struktur organisasi berdasarkan jenis pajak (PPh orang pribadi, PPh Badan, Pot/Put, dan PPN). Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, pada tahun 2007 terjadi reorganisasi Kantor Pajak (Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) di seluruh Indonesia. Dalam reorganisasi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Malang pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007, bersamaan dengan launching KPP Pratama untuk wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan meliputi 3 (tiga)

kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen.

4.1.2 Lokasi Perusahaan

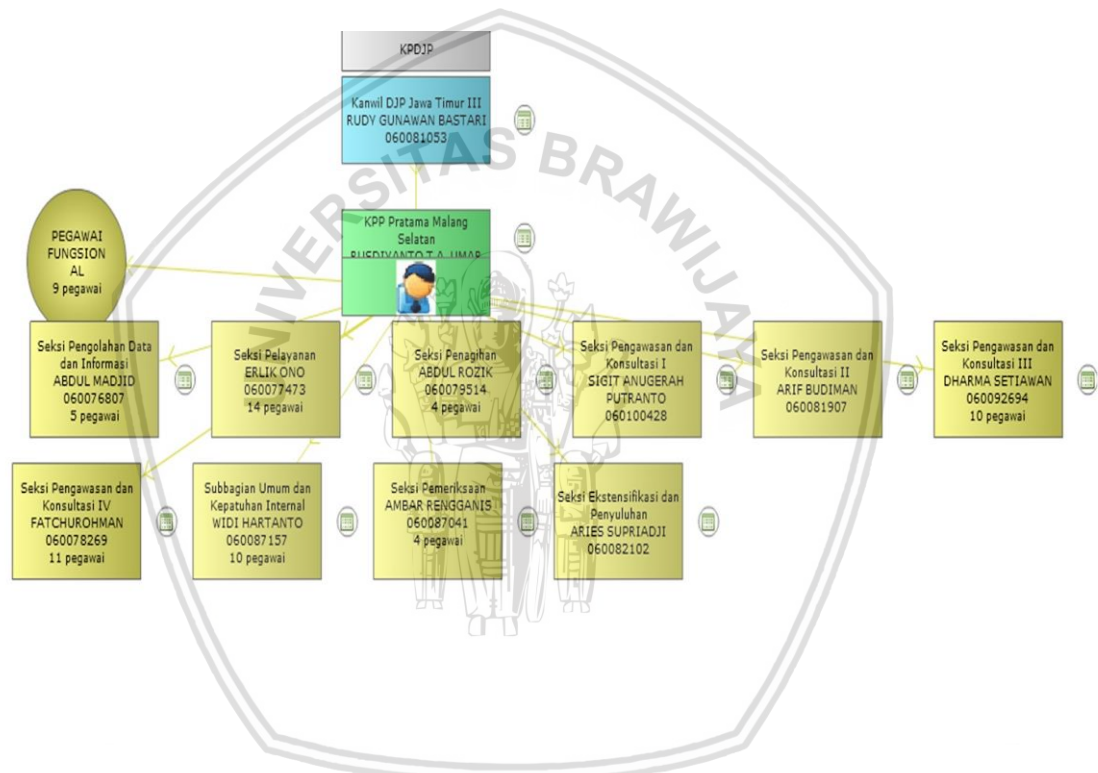
KPP Pratama Malang Selatan berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.3, Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.



Gambar 4.1 Lokasi KPP Pratama Malang

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dilihat sebagai kerangka kerja yang berfokus pada diferensiasi dari posisi, formulasi aturan dan prosedur, dan otoritas. Struktur mengacu pada hubungan yang relatif stabil dan proses organisasi (Ivancevich, et al., 2014:473). Adapun struktur organisasi KPP Pratama Malang Selatan per tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang

4.2 Visi, Misi, dan Tujuan

4.2.1 Visi KPP Pratama Malang Selatan

Selalu menjadi salah satu pilar utama dan kuat dalam mendukung terlampaunya target penerimaan negara di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

4.2.2 Misi KPP Pratama Malang Selatan

1. Mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, leaflet, spanduk, banner dan sejenisnya tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan bangsa
2. Selalu melakukan update terhadap alat-alat dan metode pelayanan
3. Bekerja keras dan cerdas serta bersungguh-sungguh dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara di wilayah KPP Pratama Malang Selatan sesuai norma dan ketentuan DJP
4. Melakukan perencanaan langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi dalam memperbesar/mempercepat angka penerimaan negara wilayah Malang Selatan yang dilakukan secara berkala

4.3 Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM

Setelah mendapatkan data dari sumber, penulis telah mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu :

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 2017
2. Jumlah Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2017
3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 2018

4. Jumlah Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2018
5. Jumlah Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 2017
6. Jumlah Setoran Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2017
7. Jumlah Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Juli – September 2018
8. Jumlah Setoran Wajib Pajak Badan bulan Juli – September 2018

Data yang telah penulis dapatkan akan di bandingkan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan tingkat setoran Wajib Pajak UMKM pasca diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

4.3.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

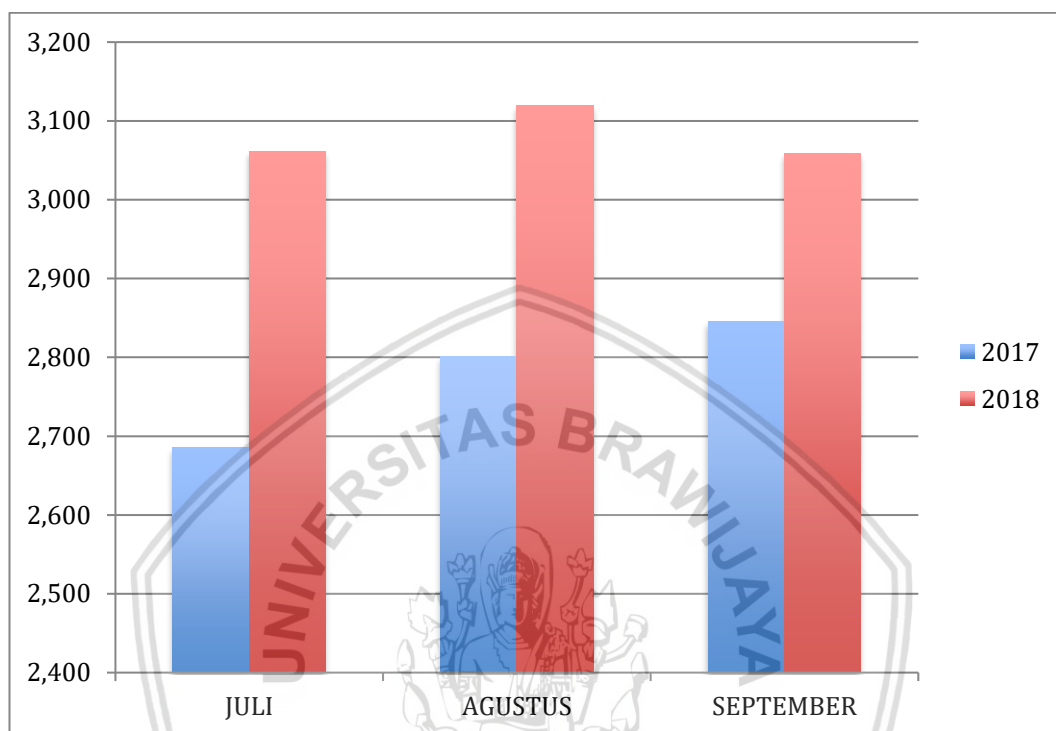
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan dianalisis berdasarkan pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah WP Bayar OP

MASA	2017	2018
JULI	2,686	3,061
AGUSTUS	2,801	3,119
SEPTEMBER	2,845	3,059
JUMLAH	8,332	9,239

Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya kenaikan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 907 jiwa (dapat di hitung dari jumlah pada tahun 2018 di kurang tahun 2017 atau sebesar $9,239 - 8,332 = 907$). Untuk

lebih jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3 Jumlah WP Bayar OP

Berdasarkan pada diagram diatas, terlihat kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Kenaikan ini merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yang merepresasikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi semakin patuh pasca diberlakukannya peraturan ini.

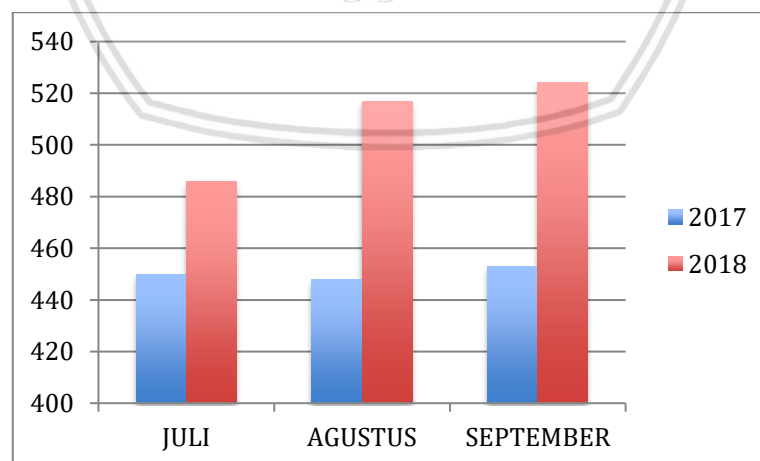
4.3.2 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan akan dianalisis berdasarkan pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah WP Bayar Badan

MASA	2017	2018
JULI	450	486
AGUSTUS	448	517
SEPTEMBER	453	524
JUMLAH	1,351	1,527

Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya kenaikan Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 176 jiwa (dapat di hitung dari jumlah pada tahun 2018 di kurang tahun 2017 atau sebesar $1,527 - 1,351 = 176$). Untuk lebih jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.4 Jumlah WP Bayar Badan

Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Kenaikan ini merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yang merepresasikan bahwa Wajib Pajak Badan semakin patuh pasca diberlakukannya peraturan ini.

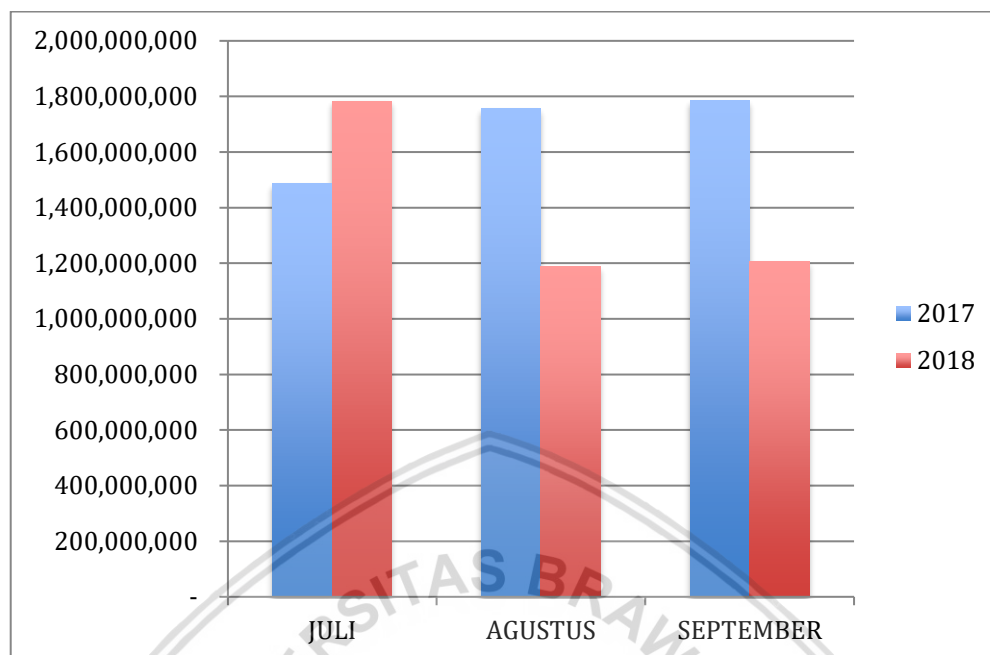
4.3.3 Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat setoran Wajib Pajak Orang Pribadi akan dianalisis berdasarkan pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Setoran WP OP (dalam rupiah)

MASA	2017	2018
JULI	1,486,043,332	1,782,692,633
AGUSTUS	1,757,125,196	1,187,909,799
SEPTEMBER	1,785,925,249	1,205,988,301
JUMLAH	5,029,093,777	4,176,590,733

Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya penurunan setoran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp. 852,503,044 (dapat di hitung dari jumlah setoran pada tahun 2017 di kurang tahun 2018 atau sebesar $5,029,093,777 - 4,176,590,733 = 852,503,044$). Untuk lebih jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat setoran Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.5 berikut:



Gambar 4.5 Jumlah Setoran WP OP

Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat penurunan yang signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017, dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Penurunan ini merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (perubahan tarif sebesar 0,5%).

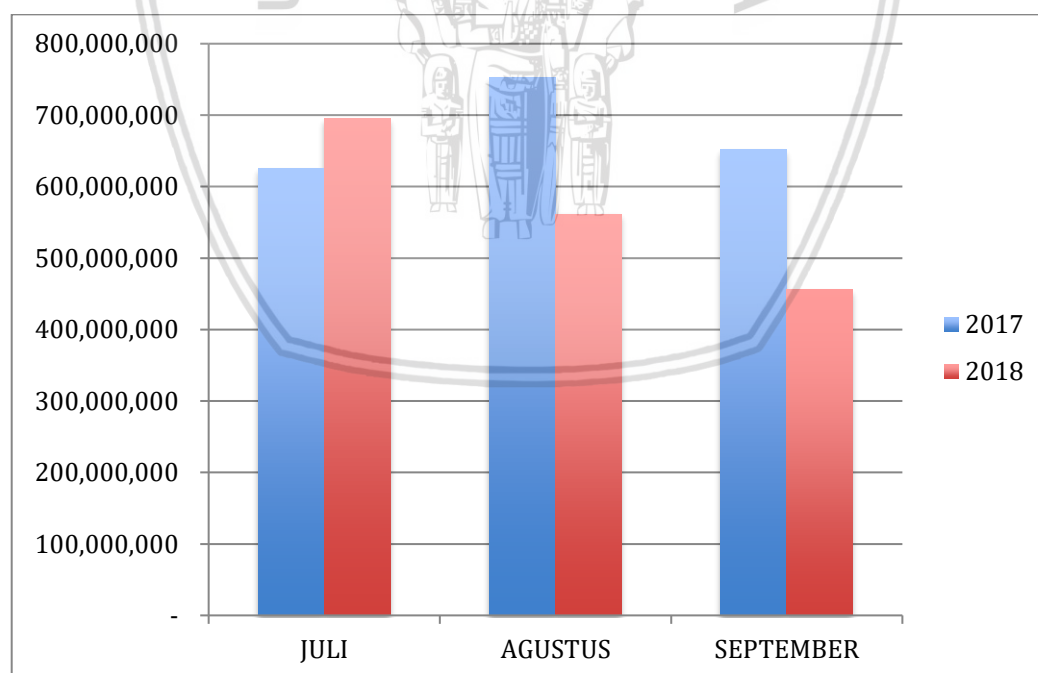
4.3.4 Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Badan

Tingkat setoran Wajib Pajak Badan akan dianalisis berdasarkan pada perbandingan antara tahun 2017 dengan 2018. Analisis Tingkat Setoran Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Setoran WP Badan (dalam rupiah)

MASA	2017	2018
JULI	625,307,765	695,333,683
AGUSTUS	752,308,888	561,658,363
SEPTEMBER	651,755,198	456,558,203
JUMLAH	2,029,371,851	1,713,550,249

Menurut data yang telah terpaparkan diatas, terlihat adanya penurunan setoran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp. 315,821,602 (dapat di hitung dari jumlah setoran pada tahun 2017 di kurang tahun 2018 atau sebesar $2,029,371,851 - 1,713,550,249 = 315,821,602$). Untuk lebih jelasnya dapat didukung oleh grafik tingkat setoran Wajib Pajak Badan pada tahun 2017 dan 2018 pada gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6 Jumlah Setoran WP Badan

Apabila melihat dari diagram diatas, terlihat penurunan yang signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 (diagram berwarna biru merupakan tahun 2017,

dan diagram berwarna merah merupakan tahun 2018). Penurunan ini merupakan dampak dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (perubahan tarif sebesar 0,5%).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian terkait dengan analisis tingkat kepatuhan dan setoran wajib pajak orang pribadi dan badan terhadap dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggunakan analisis studi kasus dalam penelitian ini sudah memenuhi dari uji perbandingan antara tahun 2017 dan 2018. Data yang dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan sebagai pemberi data dan Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan, yang mengetahui seluk beluk dan paham betul mengenai perpajakan dan telah diuji validitas dan reliabilitas dengan melakukan uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan dan perpanjangan pengamatan, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap analisis tingkat kepatuhan dan setoran.

Pada analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar namun terdapat penurunan jumlah setoran yang dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini memenuhi konteks kepatuhan formal dimana target dalam hal “peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat terpenuhi” sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahayu (2013 : 138) bahwa Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret.

4.4.1. Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan hasil analisis yaitu adanya kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang direpresentasikan dari naiknya jumlah (masa). Menurut hasil wawancara yang telah didapatkan dari Hasan Mustafa, sebagai *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan menyatakan bahwa:

“Masih rendahnya tingkat kepatuhan dapat dilihat dari jumlah WP UMKM yang menyeter di KPP Pratama Malang Selatan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah WP yang berada di Malang. Jumlah yang tidak sesuai tersebut menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan adanya penurunan tarif, seperti yang ditetapkan oleh pemerintah terhitung mulai 1 Juli 2018, pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% dari 1% (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).”

Kenaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ini merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atau karena adanya penurunan tarif pajak UMKM yang awalnya 0.5% menjadi 1% dalam jangka waktu 3 bulan.

4.4.2. Hasil Analisis Tingkat Setoran Pajak

Tabel 4.3 dan 4.4 menunjukkan hasil analisis yaitu turunnya setoran pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Setoran pajak yang menurun ini dapat dikatakan sebagai akibat dari jangka waktu penerapan peraturan yang terhitung baru tiga bulan sejak peraturan ditetapkan. Berdasarkan pada hasil jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Rusdiyanto sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Malang Selatan yang menyatakan bahwa:

“dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan mengalami penurunan pada tingkat setoran karena dirasa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dari sisi setoran dapat menurunkan, karena kebijakan ini memang masih kontraproduktif dengan kenaikan target pajak dan tingkat setoran turun. Otomatis jika riil di lapangan tingkat setoran akan menurun sejalan dengan besarnya jumlah wajib pajak. Sebabnya dengan adanya ketentuan 0,5 % itu kuantitas dari wajib pajak akan bertambah. Dapat dilihat dari data pada bulan juli dan agustus bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat setoran”.

Penurunan pada tingkat setoran wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ini merupakan hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atau karena adanya penurunan tarif pajak UMKM yang awalnya 0.5% menjadi 1% dalam jangka waktu 3 bulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan dan Setoran Wajib Pajak UMKM Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait tingkat kepatuhan dan setoran wajib pajak Pasca Diberlakukannya PP No.23/2018. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti, untuk kurun waktu 3 bulan (terhitung Juli 2018 – September 2018), dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi dan Badan meningkat. Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara formal, yaitu sesuai dengan target (adanya kenaikan pada jumlah wajib pajak).
2. Menurut hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tingkat setoran Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi dan Badan menurun. Hal ini mencakup kepatuhan wajib pajak secara material, walaupun jumlah setoran menurun, akan tetapi wajib pajak yang dahulunya belum patuh menjadi patuh, dan diharapkan setoran akan bisa meningkat kedepannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dirasakan dalam penelitian ini adalah belum ada mencari penelitian terdahulu yang membahas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dikarenakan peraturan ini baru diluncurkan, sehingga peneliti berpaku pada penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

5.3 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan dengan melakukan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang menghasilkan kesimpulan pada bab ini juga memunculkan beberapa saran yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dalam jangka waktu satu tahun agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Melakukan penelitian untuk lingkup Kota Malang (5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses 20 November 2018.
- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aflahul Abidin. (online) Walah...Kepatuhan Membayar Pajak di Kota Malang Masih Rendah. Diakses dari (<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/10/24/walahkepatuhan-membayar-pajak-di-kota-malang-masih-rendah>) pada 18 Desember 2018
- Alfinovita, I. A., & Sukoharsono, E. G. (2013). Evaluasi sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit UMKM (Studi pada PT BPR Nusumma Jatim). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Agoes, Sukrisno. (2014). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Edisi ke 4. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B, Marshal Romney, dan Steinbart, Paul John. (2009). *Accounting Information Systems*. USA: Cengage Learning.
- Burhan, H.P. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)*. Semarang.
- Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Cooper, Donald R. & Schindler, Pamela S. (2011). *Business Research Methods, 11th Edition*. New York: McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W. (2009). *Qualitative inquiry and research desgin: Choosing five approaches*. California: Sage.
- Dewi, I. P. (2007). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Malang.

- Dharma, M.T. & Ariyano, S. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang*. Jakarta.
- Franatra, R., Sirajuddin, B., & Keristin, U. (2014). *Analisis Perencanaan Pajak Berdasarkan PP 46, Norma Perhitungan Pada Kondisi Keuangan CV.Hendrik Jaya*. Palembang.
- Hakim, Fadli & Nangoi, G. B. (2015). *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Manado.
- Huda, M Syamsul & Setiawan, Agus. (2014). Analisis Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada UD. Songkok Mitra Gresik. *Jurnal Fakultas Ekonomi Volume 03, Nomor 01, Juli 2014 Hal 69 – 84*.
- Ivancevich, John M., et al. (2014). *Organizational Behavior and Management*. 10th Edition. New York: McGraw-Hill Education
- Kartiko, D.A. (2016). Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Vol 4, No 2*.
- Keziana. (2016). Analisis Penerapan PP. No 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA) ISSN: 2337-56xx.Volume: xx, Nomor: xx*.
- Krisyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Mahendra, Y.I. & Pradoto, Wisnu. (2016). *Transformasi Spasial di Kawasan Peri Urban Kota Malang*. Semarang.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. (2017). *Metode Penelitian;Penelitian Kualitatif, Tingkatan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Rahmad Adi. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yg terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.1 No 2.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Prabantari, F. (2017). *Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Semarang.

Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Sari, E.K. (2017). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Lembaga Keuangan (Studi Kasus : Pelaku UMKM Pengusaha Wanita Pada Paguyupan Perempuan Mandiri Sumber Perubahan di Kota Malang)*. Malang.

Sagita, F. (2015). *Analisis Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Untuk UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak Akhir Tahun*. Lampung.

Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Simanjuntak, Timbul. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

- Sukoharsono, Eko Ganis. (2006). *Alternatif Riset Kualitatif Sain Akuntansi: Biografi, Phenomenology, Grounded Theory, Critical Etnografi dan Case Study*. Analisis Makro dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia. Karya Bersama. BPFE Unibraw.
- Suliyanto. (2014). *Statistika nonparametrik: dalam statistik penelitian*. Andi publisher. Yogyakarta
- Sumarsan, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks.
- Tambunan, Tulus T.H. (2017). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Timotius, Kris. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2008
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
- Urlita, I.T. (2017). *Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Malang*. Malang.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian-Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Williams, Brian K., dan Sawyer, Stacey C. (2007). *Using Information Technology: Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi*. (Edisi 7). Yogyakarta: ANDI.
- Yusuf, A Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zuldafril dan Muhammad. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Transkrip Wawancara dengan Informan 1

(Hasan Mustafa, sebagai *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan)

Peneliti : “Selamat sore Mas Hasan, perkenalkan nama saya Salsabila Keisha Azzahra dari jurusan akuntansi FEB UB angkatan 2015. Sebelumnya terimakasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya wawancara perihal penunjang data untuk skripsi. Sudah bisa saya mulai sekarang, ya?”

Informan : “Selamat sore Dik Keisha, oh iya boleh.”

Peneliti : “Boleh tahu nama lengkap beserta jabatannya, Mas?”

Informan : “Nama saya Hasan Mustafa, sebagai *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di KPP Pratama Malang Selatan.”

Peneliti : “Baik Mas, langsung saja ya, sehubungan dengan penurunan tarif untuk Wajib Pajak UMKM yakni sebesar 0,5% dari 1%, atau dalam peraturannya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, itu boleh tahu kondisi sebelum diterapkannya peraturan yang baru, Mas?”

Informan : “Jadi, sesuai dengan jumlah UMKM yang berada di Malang, itu Dik Keisha nanti bisa lihat di BPS, itu jumlah UMKM yang ada tidak sesuai dengan jumlah WP UMKM yang patuh.”

Peneliti : “Boleh dijelaskan, Mas, tidak sesuainya itu bagaimana?”

Informan : “Saya lupa berapa jumlah pastinya, akan tetapi jumlah WP UMKM, baik badan maupun orang pribadi, itu masih sedikit yang patuh. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan WP UMKM ini agar semuanya membayar pajak, diturunkanlah tarifnya menjadi 0,5%. UMKM kan lagi *booming* di Indonesia, apalagi di Malang ya, khususnya Malang Selatan, ini bisa jadi sumber pendapatan juga lho, Dik.”

Peneliti : “Baik Mas, nanti saya akan *check* ke BPS nya untuk jumlah pastinya. Oh iya Mas, boleh tahu cakupan Malang Selatan itu dimana saja?”

Informan : “Jadi, di Malang kan ada 5 kecamatan. Akan tetapi, KPP Pratama Malang Selatan itu mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen.”

Peneliti : “Baik, oh iya untuk PP 23 ini kan terbilang masih baru ya, Mas, baru mulai diterapkan terhitung 1 Juli 2018. Jadi nanti saya akan membandingkan 3

bulan, Mas. Juli, Agustus, September 2018 hingga Juli, Agustus, September 2017 saat tarifnya 1% dan 0,5%.”

Informan : “Iya, bisa. Nanti data yang di dapatkan akan berupa tabel yaa. Ini datanya, bisa dilihat dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa kok di send.” *(informan memperlihatkan data yang telah diminta peneliti di komputer)*

Peneliti : “Wah, WP nya makin banyak ya, Mas. Tapi, kok, setorannya turun, Mas?”

Informan : “Iya, karena tarifnya sendiri kan turun jadi 0,5%. Harapannya sih, kuantitasnya bertambah nanti kedepannya. Jadi, target pemerintah ini sebenarnya, WP yang belum bayar agar bayar. Lebih ke jangka panjang sih. Mungkin kalau sekarang masih belum kelihatan. Oh iya, Dik, ini datanya saya copy dulu ya, kebetulan Pak Rusdi ada di kantor dan lagi free, kalau mau wawancara boleh.”

Peneliti : “Baik Mas, terimakasih banyak.”

Transkrip Wawancara dengan Informan 2

(Rusdi, sebagai Kepala Kantor Pajak Pratama Malang Selatan)

Peneliti : “Assalamualaikum warrahmatalullah hiwabarakatuh. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Salsabila Keisha Azzahra dari jurusan akuntansi FEB UB angkatan 2015.”

Informan : “Waalaikumsalam, dik. Ini yang penelitiannya tentang PP baru, ya?”

Peneliti : “Iya, pak.”

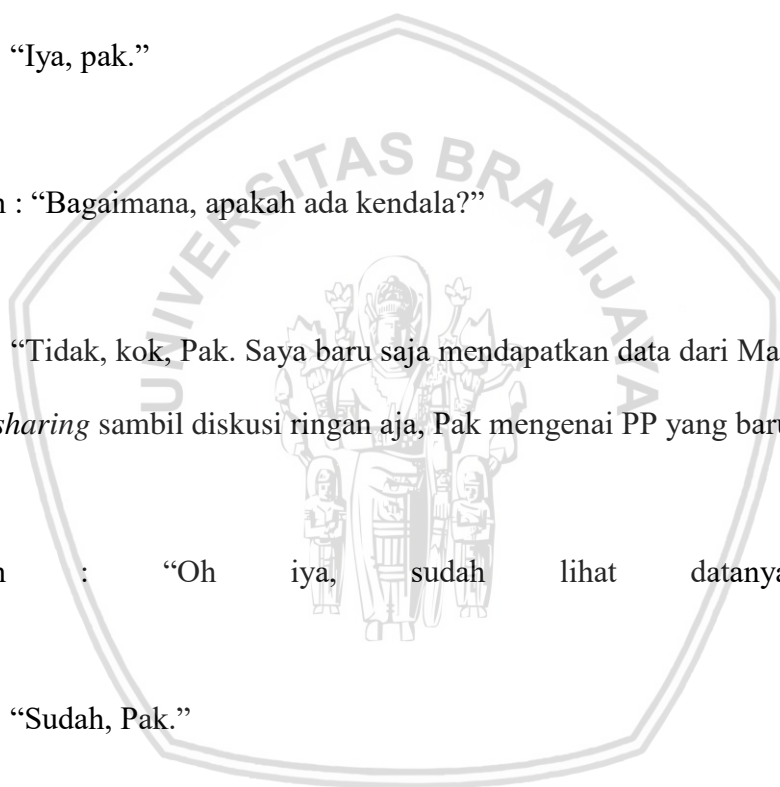
Informan : “Bagaimana, apakah ada kendala?”

Peneliti : “Tidak, kok, Pak. Saya baru saja mendapatkan data dari Mas Hasan, lalu ini mau *sharing* sambil diskusi ringan aja, Pak mengenai PP yang baru.”

Informan : “Oh iya, sudah lihat datanya, kan?”

Peneliti : “Sudah, Pak.”

Informan : “Kalau dari data itu, jumlah WP nya meningkat ya, berhasil berarti upaya pemerintah. Hal ini juga mencakup di dalam kepatuhan wajib pajak secara formal. Kalau materialnya ada hubungannya sama jumlah setoran. Walaupun setorannya turun, tapi karna baru 3 bulan ya belum kelihatan. Sebenarnya kebijakan ini sebenarnya kontraproduktif dengan kenaikan target pajak. Tapi, upaya pemerintah ini *goal* lah ya bisa dibilang. WP UMKM yang tadinya malas



membayar karna besar tarifnya, jadi bayar sekarang. Kalau dari Dik Keisha sendiri ada yang mau ditanyakan tidak?”

Peneliti : “Untuk terkait tingkat kepatuhan dan setoran sudah jelas Pak. Mungkin lebih ke lingkup saja, pusat UMKM itu berada disini, ya, Pak?”

Informan : “Oh, iya, karna Malang Selatan ini ada Pasar Besar, Blimbing, ya cakupannya pasar-pasar ibaratnya, jadi sebenarnya penelitian kamu ini sudah bisa merepretasikan Kota Malang, karena pusatnya disini.”

Peneliti : “Baik, Pak, Terimakasih.”

